

Implementasi Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Padang Lawas

¹Putra Aulia Ramadhan, ²Siti Hazzah Nur

¹²Universitas Sumatera Utara

e-mail Correspondent: ¹putraauliaramadhan77@gmail.com, ²sitihazzah@usu.ac.id

Received: 03-08-2025

Revised: 04-09-2025

Accepted: 05-10-2025

Info Artikel

Abstract

Keywords: *Program Implementation, Educational Services, School Operational Assistance*

The high number of children who do not continue their education to junior high school (SMP) due to limited facilities, especially in remote areas, is a serious problem in Padang Lawas Regency. The School Operational Assistance (BOS) program, which is expected to support equitable distribution of educational services, is deemed suboptimal. This study aims to describe the implementation of the BOS program at the junior high school level in Padang Lawas Regency. The study used qualitative methods with a descriptive approach. Data were obtained through interviews, observations, literature studies, and secondary data. The analysis was based on policy implementation indicators according to Charles O. Jones (1996), which include organization, interpretation, and application. The research informants included officials from the Education and Culture Office, school principals, community leaders, and dropouts. The results indicate that the organization of the BOS program is suboptimal due to the lack of regional regulations, such as Regent Regulations, that adapt central policies to local conditions. In terms of interpretation, the use of BOS funds does not fully reflect social, economic, and geographic needs, for example, the purchase of technology in areas with unstable electricity, while basic infrastructure is neglected. In terms of implementation, despite the budget increase, the impact on education quality has not been significant. The allocation model based on student numbers results in small schools in remote areas receiving minimal funding, despite their greater needs.

Abstrak

Tingginya angka anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) akibat keterbatasan fasilitas, terutama di wilayah terpencil, menjadi permasalahan serius di Kabupaten Padang Lawas. Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diharapkan mampu mendukung pemerataan layanan pendidikan dinilai belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Program Dana BOS tingkat SMP di Kabupaten Padang Lawas. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, studi pustaka, dan data sekunder. Analisis didasarkan pada indikator implementasi kebijakan menurut Charles O. Jones (1996) yang

Kata kunci:

Implementasi Program,
Layanna Pendidikan,
Bantuan Operasional
Sekolah

meliputi pengorganisasian, interpretasi, serta penerapan/aplikasi. Informan penelitian terdiri dari pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kepala sekolah, tokoh masyarakat, serta anak-anak putus sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengorganisasian Program BOS belum optimal karena ketiadaan regulasi daerah seperti Peraturan Bupati yang mampu menyesuaikan kebijakan pusat dengan kondisi lokal. Pada aspek interpretasi, penggunaan dana BOS belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan sosial, ekonomi, dan geografis, misalnya pembelian teknologi di daerah dengan listrik tidak stabil, sementara sarana dasar terabaikan. Dari sisi penerapan, meskipun anggaran meningkat, dampaknya terhadap mutu pendidikan belum signifikan. Pola alokasi berbasis jumlah siswa menyebabkan sekolah kecil di daerah terpencil menerima dana minim, padahal kebutuhan mereka lebih besar.

Pendahuluan

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan dengan menyediakan biaya non-personalia, sehingga sekolah dapat beroperasi tanpa membebani orang tua.¹ Program ini sejalan dengan amanat UUD 1945, Pancasila, serta UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan hak setiap warga negara memperoleh pendidikan bermutu.² BOS diharapkan mampu menunjang program wajib belajar 9 tahun, yang kemudian diperluas menjadi 12 tahun, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyiapkan generasi emas 2045.³ Pengelolaan dana pendidikan sangat menentukan kualitas sekolah. Jika dikelola transparan dan berbasis kebutuhan, dana dapat mendukung sarana prasarana, peningkatan kompetensi guru, serta pembelajaran inovatif. Sebaliknya, pengelolaan yang tidak efisien dapat menurunkan motivasi, memperlebar kesenjangan antar sekolah, dan menghambat pencapaian standar pendidikan. BOS berperan penting mengurangi ketergantungan sekolah pada pungutan orang tua dan membuka akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu⁴.

Di Kabupaten Padang Lawas, implementasi BOS masih menghadapi tantangan. Meskipun dana dialokasikan sesuai aturan, sekolah masih kekurangan sarana, distribusi dana kerap terlambat, dan pengawasan terbatas. Faktor geografis serta rendahnya kesadaran masyarakat memperburuk keadaan. Akibatnya, angka putus sekolah, khususnya dari SD ke SMP, masih tinggi. Hal ini menunjukkan BOS belum sepenuhnya menjawab persoalan nyata pendidikan di daerah.

Tabel 1 Data Jumlah yang tidak melanjutkan Pendidikan ke jenjang SMP di Kabupaten Padang Lawas

Tahun	SD	SMP	Jumlah yang tidak melanjutkan ke jenjang SMP

¹ Dwi Wulan Sari and Qolbi Khoiri, "Pendidikan Untuk Semua: Studi Pada Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun," *Journal on Education* 5, no. 3 (2023): 9441–50, <https://doi.org/10.31004/joe.v5i3.1757>.

² Achmad Karimulah and Nur Ittihadatul Ummah, "Pelaksanaan Supervisi Akademik Kepala Madrasah Sebagai Upaya Meningkatkan Profesionalisme Guru Untuk Memotivasi Belajar Siswa MTs Muqoddimatul Akhlak Curah Wungkal Silo Jember," *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management* 3, no. 1 (2021): 13–34, <https://doi.org/10.21154/sajiem.v3i1.74>.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Statistik Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Padang Lawas*. Diakses dari <https://kemendikbud.go.id>

Implementasi Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Padang Lawas

2021	36.379	13.120	23.259
2022	35.952	12.820	23.132
2023	39.275	12.864	26.411

Sumber: website Kemendikbud. go.id dan Dispen Provsu, 2023

Tabel menunjukkan tingginya jumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP di Kabupaten Padang Lawas, yang menandakan adanya tantangan dalam implementasi dana BOS. Hal ini menuntut pengelolaan dana secara strategis dan berbasis kebutuhan lokal dengan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, dinas pendidikan, sekolah, dan masyarakat. Pendampingan serta pelatihan bagi pengelola sekolah juga diperlukan agar penggunaan dana lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Tingginya angka putus sekolah di Padang Lawas dipengaruhi oleh empat faktor utama. Pertama, faktor ekonomi, banyak keluarga kurang mampu yang tidak sanggup membiayai anaknya ke jenjang SMP dan lebih memilih anak membantu perekonomian keluarga. Kedua, keterbatasan fasilitas pendidikan, sekolah dasar cukup banyak, tetapi SMP dan SMA masih terbatas serta terkonsentrasi di kota atau kecamatan. Jarak tempuh 15–22 km ke sekolah menambah beban biaya transportasi, membuat siswa dari keluarga miskin sulit melanjutkan sekolah. Ketiga, kesenjangan fasilitas, sekolah di kota lebih baik sehingga siswa cenderung memilih sekolah di pusat kota. Keempat, faktor teknologi, penggunaan HP secara berlebihan membuat banyak anak lebih tertarik bermain game online daripada belajar.



Gambar 1 Anak – anak Yang Tidak Sekolah dan Memilih Bermain Game

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Factor lingkungan, banyaknya siswa yang tidak melanjutkan sekolah membuat para siswa cenderung mengikuti hal sama. Di Kabupaten Padang Lawas, salah satu tantangan terbesar dalam pendidikan adalah budaya masyarakat yang cenderung menganggap pendidikan bukan sebagai prioritas utama. Banyak siswa memilih untuk tidak melanjutkan sekolah setelah menyelesaikan jenjang dasar karena dipengaruhi oleh lingkungan sosial, di mana sebagian besar teman sebayanya juga tidak melanjutkan pendidikan. Selain itu, hal ini juga dipengaruhi oleh Adanya budaya "cukup tamat SD/SMP saja", terutama bagi anak perempuan, karena dianggap akan menikah muda. Dilihat dari segi anggaran berikut anggaran APBD Kabupaten Padang Lawas untuk tiga tahun terakhir:

Tabel 2 APBD Padang Lawas tahun 2021-2023

Tahun	2021	2022	2023
Anggaran	Rp.1.100.410.777.974	Rp.1.086.838.697.971	Rp.1.118.745.149.960

Sumber: Website PRP2 Sumut, 2024

Ditahui juga bahwa untuk Besaran APBD Kabupaten Padang Lawas pertahun 2024 dari data yang di ambil di Progress Report Pengendalian Pembangunan Sumatera Utara (PRP2 SUMUT) sebesar Rp. 1.128.122.508.129. APBD ini di realisasikan ke dalam empat belanja wajib, belikut tabel data realisasi APBD pertahun 2023 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3 Belanja Wajib APBD

Belanja Wajib	Aturan UU	APBD	Anggaran
Pendidikan	20%	24,98%	Rp. 280.968.519.883
Kesehatan	10%	31,66%	Rp. 292.550.773.226
Infrastruktur Daerah	40%	16,51%	Rp. 136.678.965.363
Dana Desa	10%	43,59%	Rp. 230.275.200.000

Sumber: Website PRP2 Sumut, 2024

Berdasarkan data diatas yang merujuk pada data anggaran tahun 2025, diketahui bahwa alokasi untuk program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Padang Lawas mencapai Rp48.402.574.000, yang merupakan sekitar 17,14% dari total anggaran sektor pendidikan. Angka ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung keberlangsungan kegiatan operasional sekolah, terutama untuk kebutuhan nonpersonalia seperti pembelian alat tulis, buku, bahan ajar, perawatan fasilitas sekolah, serta biaya kegiatan ekstrakurikuler dan peningkatan kapasitas guru. Namun demikian, meskipun jumlahnya cukup signifikan, porsi dana BOS yang hanya sekitar 17,14% dari keseluruhan anggaran pendidikan menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran pendidikan lainnya masih terserap untuk belanja operasional rutin, seperti gaji tenaga pendidik, honorarium, dan belanja modal. Ini juga mengindikasikan bahwa masih terbatasnya ruang fiskal untuk memperluas jangkauan bantuan langsung ke siswa atau sekolah dalam bentuk program afirmatif tambahan seperti subsidi transportasi atau beasiswa daerah.

Dilihat dari segi fasilitas pendidikan, Berdasarkan data pokok pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah kabupaten padang lawas kategori Negeri dan Swasta ditetapkan memiliki 144 Taman Kanak-kanak (TK), 197 Sekolah Dasar (SD), 39 Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 28 untuk Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK), yang diantaranya tersebar kedalam 17 kecamatan di kabupaten padang lawas, diantaranya sebagai berikut;

Tabel 4 Persebaran Sekolah TK, SD, SMP, SMA/SMK 2024

Wilayah	Taman Kanak-kanak (TK)	Sekolah Dasar (SD)	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK)
Kec. Barumun	17	25	4	8
Kec. Huta Raja Tinggi	20	27	8	3
Kec. Lubuk Barumu	8	16	4	4
Kec. Sosopan	6	12	2	1
Kec. Ulu Barumun	4	14	1	1
Kec. Sosa	10	11	3	4
Kec. Barumun Tengah	7	14	1	2
Kec. Hurisrak	8	15	3	1
Kec. Aek Nabara Barumun	9	10	2	2
Kec. Ulu Sosa	3	9	2	0

Wilayah	Taman Kanak-kanak (TK)	Sekolah Dasar (SD)	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK)
Kec. Barumun Baru	6	9	1	0
Kec. Batang Bulu Sutam	4	6	1	0
Kec. Barumun Selatan	4	7	1	1
Kec. Sosa Julu	3	7	2	0
Kec. Sosa Timur	1	6	2	0
Kec. Sihapas Barumun	2	5	1	1
Kec. Barumun Barat	2	4	1	0
Total	114	197	39	28

Sumber: Website Kemendikbud.go.id, 2024

Tabel tersebut diketahui bahwa Pembangunan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Padang Lawas masih belum merata, terutama di daerah-daerah yang secara geografis luas seperti Kecamatan Barumun, Aek Nabara Barumun, dan Barumun Selatan. Luasnya wilayah serta pemekaran kecamatan dan desa yang belum diikuti pembangunan sekolah baru menyebabkan akses pendidikan menjadi sulit dijangkau, khususnya bagi siswa di pelosok. Sistem zonasi pada penerimaan siswa baru di Kabupaten Padang Lawas belum sepenuhnya sesuai kondisi lokal, karena banyak anak yang tinggal jauh dari pusat kecamatan harus menempuh perjalanan jauh untuk mengakses sekolah. Kekurangan sarana dan prasarana, seperti ruang kelas tidak layak, minimnya perpustakaan dan laboratorium, serta keterbatasan guru, khususnya di SMP daerah terpencil seperti Barumun Tengah, semakin memperburuk mutu pendidikan. Kondisi ini berdampak langsung pada kualitas pembelajaran dan motivasi siswa, serta memperlebar kesenjangan antarwilayah.

Sebagai upaya, pemerintah telah mengalokasikan Dana BOS untuk mendukung operasional sekolah, pengembangan fasilitas, dan peningkatan kualitas guru.⁵ Namun, implementasinya masih menghadapi kendala serius, seperti alokasi yang tidak tepat sasaran, lemahnya pengawasan, dan minimnya perhatian terhadap kebutuhan riil siswa.⁶ Banyak sekolah memprioritaskan dana untuk kebutuhan administratif, sementara masalah transportasi, perlengkapan belajar, dan beasiswa belum tertangani.⁷ Di Kabupaten Padang Lawas, angka putus sekolah masih tinggi akibat rendahnya minat pendidikan, faktor ekonomi yang memaksa anak bekerja, serta infrastruktur pendidikan yang terbatas.⁸

⁵ Shofwa Nursiniah and Rusmiati Aliyyah, "Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar," *Karimah Taubid* 3 (2024): 2832–55.

⁶ Pri Sisilia Windy, "Tantangan Dan Solusi Dalam Menegelola Keuangan Sekolah Secara Efektif," *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan* 02, no. 01 (2025): 350–55.

⁷ M Syukron Ali Amiruddin et al., "Policy Innovations in Reducing Education Costs : Evidence-Based Strategies to Improve Accessibility and Quality Inovasi Kebijakan Dalam Mengurangi Biaya Pendidikan : Strategi Berbasis Bukti Untuk Meningkatkan Aksesibilitas Dan Kualitas," *Ico Edusha*, 2024, 557–69.

⁸ Wildan Fauzi Harahap, Imsar Imsar, and Nur Ahmadi Bi Rahmani, "Analisis Efektivitas Pemekaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Dalam Perspektif Maqasyid Syariah," *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 11, no. 2 (2023): 1869–84, <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i2.4966>.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun BOS telah dikucurkan, efektivitasnya masih rendah karena tidak sesuai dengan kebutuhan lokal.⁹ Penggunaan dana yang tidak tepat, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan, dan lemahnya pemetaan kebutuhan siswa menjadi hambatan utama.¹⁰ Penelitian mengenai implementasi BOS di Padang Lawas penting dilakukan untuk menelaah sejauh mana program ini menjawab tantangan pendidikan, sekaligus memberikan rekomendasi strategis dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan, menekan angka putus sekolah, dan mendukung pembangunan sumber daya manusia. Sebagai referensi, penelitian Putu Sucika dan I Nyoman Suprpta (2018) menunjukkan implementasi BOS di SD Negeri 1 Penarukan cukup berhasil, meskipun masih terkendala keterlambatan pencairan dan minimnya sarana¹¹.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Agung Saputra (2018) yang berjudul tentang Alokasi Anggaran Pendidikan Di Indonesia. Hasil penelitian, sistem alokasi anggaran pendidikan di Indonesia ini sangat dipengaruhi kebijakan pemerintah. Pembiayaan pendidikan ini tergantung pada pengelolaan pendidikan di daerah masing-masing. Namun pengelolaan pembiayaan pendidikan harus sesuai dengan standar pembiayaan nasional. Pendidikan di Indonesia dilaksanakan sesuai keijakan pendidikan yang mengatur pendidikan nasional, sistem pendidikan, serta alokasi anggaran sebesar 20% yang diperoleh dari APBN dan APBD. Di Indonesia sendiri sudah melakukan berbagai program dalam rangka meningkatkan tingkat pendidikan, salah satunya dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan pemberlakuan sekolah gratis. Akan tetapi hal ini belum berarti dapat suatu daerah tidak memiliki tingkat pendidikan yang rendah, namun melalui program-program ini sudah mampu masyarakat memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu alokasi ini juga membantu kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan agar hidup lebih layak sehingga mampu memberikan layanan pendidikan yang bermutu bagi masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh feiby Ismail dan Nindy Sumaila pada tahun (2020) yang berjudul Implementasi Manajemen Pembiayaan Dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bitung, Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan BOS di MAN 1 Bitung terwujud melalui fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan meliputi penyusunan rancangan anggaran. Kemudian, tahap pelaksanaan dilakukan melalui sosialisasi dan pencairan dana. Tahap terakhir adalah tahap pengawasan. Melalui pelaksanaan fungsi manajemen ini, pengelolaan keuangan BOS di MAN 1 Bitung berdampak positif terhadap proses pendidikan¹².

Meskipun demikian, perlu adanya koordinasi dengan setiap unsur madrasah untuk menjamin akuntabilitas dana BOS. Pembaharuan yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah Yang pertama, perbedaan lokasi yang dijadikan tinjauan penelitian. Selain itu, pada penelitian ini berfokus pada Implementasi Program dana BOS Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Padang Lawas. Meskipun terdapat beberapa kesamaan dengan penelitian sebelumnya namun terdapat perbedaan pada penggunaan Teori yang dipakai, penelitian

⁹ Sufia Shaleheh et al., "Strategi Pengelolaan Dana BOS Untuk Mewujudkan Efisiensi Dan Efektivitas Keuangan Sekolah," *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2025): 400–408.

¹⁰ Ellen Rotua Basaria Sitorus et al., "Analisis Kebijakan Pembiayaan Pendidikan Tingkat SMP Di Indonesia Tantangan Dan Strategi Penanganan," *Jurnal Pendas Mabakam* 9, no. February (2024): 4–6.

¹¹ Saputra, A. (2018). *Alokasi Anggaran Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers

¹² Ismail, F., & Sumaila, N. (2020). Implementasi Manajemen Pembiayaan dalam Pengelolaan Dana BOS di MAN 1 Bitung, Sulawesi Utara. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(2), 112–125.

ini menggunakan teori implementasi program yang dikemukakan oleh Charles O. Jones (1996) yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi¹³

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.¹⁴ Fokus penelitian diarahkan pada implementasi program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Padang Lawas.¹⁵ Penelitian kualitatif dipilih karena sesuai untuk menggali secara mendalam fenomena implementasi kebijakan dalam konteks sosial, ekonomi, dan geografis setempat.¹⁶ Dalam penelitian ini tidak digunakan variabel bebas dan terikat sebagaimana pada penelitian kuantitatif, tetapi fokus penelitian diarahkan pada tiga indikator implementasi kebijakan menurut Charles O. Jones, yaitu: Pengorganisasian – bagaimana pengelolaan dan struktur pelaksanaan dana BOS di tingkat kabupaten dan sekolah. Interpretasi – bagaimana pemahaman dan penerjemahan kebijakan dana BOS di tingkat lokal. Penerapan/Aplikasi – bagaimana realisasi penggunaan dana BOS serta dampaknya pada mutu pendidikan. Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri sebagai pengumpul dan penganalisis data. Untuk mendukung, digunakan instrumen bantu berupa pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumentasi¹⁷.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama: Wawancara mendalam dengan teknik probing untuk menggali informasi lebih rinci dari setiap informan.¹⁸ Observasi lapangan terhadap kondisi sekolah, sarana prasarana, serta kegiatan penggunaan dana BOS. Dokumentasi berupa arsip laporan penggunaan dana BOS, dokumen kebijakan, dan data sekunder terkait jumlah siswa, fasilitas, serta alokasi anggaran.¹⁹ Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui tiga tahapan menurut Miles & Huberman, yaitu: Reduksi data – memilah dan menyederhanakan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penyajian data – menyusun data dalam bentuk naratif, tabel, atau kutipan langsung.²⁰ Penarikan kesimpulan – menemukan pola, hubungan, dan makna untuk menjawab fokus penelitian. Keabsahan data diperoleh melalui triangulasi sumber (membandingkan data antar-informan), triangulasi metode (menggabungkan wawancara, observasi, dan dokumentasi), serta triangulasi waktu (pengecekan data pada kesempatan berbeda)²¹.

Hasil dan Pembahasan

A. Pengorganisasian (Organizing) Dana BOS di Kabupaten Padang Lawas

Pengorganisasian merupakan proses mengatur dan mengkoordinasikan sumber daya agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif.²² Dalam konteks implementasi Dana BOS di Kabupaten Padang Lawas, pengorganisasian masih sepenuhnya mengacu pada Permendikbudristek No. 63 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS

¹³ Jones, C. O. (1996). *Pengantar Kebijakan Publik* (terj.). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011).

¹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan RD* (Bandung: Alfabeta, 2017).

¹⁶ Jones, C. O. (1996). *Pengantar Kebijakan Publik* (terj.). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

¹⁷ Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2018).

¹⁹ Sugiono.

²⁰ Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

²¹ Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press

²² Abdu Darim, "Manajemen Perilaku Organisasi Dalam Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Kompeten," *Munaddhomah* 1, no. 1 (2020): 22–40, <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v1i1.29>.

Reguler. Aturan ini mengatur penggunaan BOS untuk berbagai kebutuhan, seperti penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, pembelajaran dan ekstrakurikuler, asesmen, administrasi, pengembangan guru, langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana, penyediaan alat multimedia, peningkatan keahlian, keterserapan lulusan, hingga pembayaran honor. Meskipun ruang lingkup penggunaan sudah jelas, hasil studi lapangan menunjukkan bahwa sekolah di Padang Lawas lebih banyak memprioritaskan pada sektor tertentu, seperti pengadaan buku teks, honor tenaga kependidikan non-ASN, pemeliharaan sarana, penyediaan alat multimedia, serta kegiatan pembelajaran. Sementara itu, beberapa komponen lain jarang menjadi fokus karena keterbatasan anggaran dan perbedaan kebutuhan tiap sekolah.²³

Permasalahan utama terletak pada ketiadaan regulasi lokal berupa Peraturan Bupati (Perbup) yang dapat menyesuaikan kebijakan pusat dengan kondisi daerah. Akibatnya, sekolah hanya berpedoman pada Permendikbudristek yang bersifat umum dan kaku.²⁴ Hal ini menimbulkan perbedaan implementasi antar sekolah, terutama di wilayah terpencil yang kapasitas teknisnya terbatas, sehingga penyusunan RKAS tidak optimal. Kondisi ini diperparah dengan lemahnya sistem pengawasan. Monitoring memang dilakukan dua kali setahun, namun cenderung administratif dan belum menyentuh substansi penggunaan dana. Wawancara dengan pejabat Dinas Pendidikan menunjukkan bahwa seluruh pelaksanaan masih berlandaskan Permendikbudristek karena belum ada Perbup yang mengatur teknis lebih detail.

Padahal, di beberapa daerah lain, keberadaan Perbup mampu memperjelas alur pengelolaan, memperkuat pengawasan, dan meningkatkan transparansi. Tanpa regulasi lokal, struktur organisasi pengelola BOS di sekolah—yang biasanya terdiri dari kepala sekolah, bendahara, dan tim BOS—tidak cukup kuat untuk menjawab kebutuhan riil di lapangan.²⁵ Kelemahan pengorganisasian ini berdampak pada efektivitas kebijakan. Dana BOS belum sepenuhnya mampu menanggulangi persoalan pendidikan seperti tingginya angka putus sekolah, keterbatasan sarana, dan rendahnya partisipasi orang tua. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi daerah yang memperkuat struktur organisasi pelaksana, memperjelas peran antar aktor, serta menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Penguatan pengorganisasian di tingkat lokal menjadi kunci agar implementasi Dana BOS benar-benar dapat meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Padang Lawas.

B. Interpretasi (Interpretation) Dana BOS di Kabupaten Padang Lawas

Interpretasi merupakan proses menafsirkan dan memberi makna terhadap kebijakan agar sesuai dengan konteks lapangan.²⁶ Dalam implementasi Dana BOS di Kabupaten Padang Lawas, interpretasi tidak hanya bergantung pada pemahaman teknis, tetapi juga pada kemampuan menyesuaikan kebijakan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis setempat. Secara normatif, BOS diatur dalam Permendikbudristek No. 63 Tahun 2023 yang berlaku secara

²³ Heri Setiawan and Marjan Miharja, "Analisis Penggunaan Dana BOS Di SMA Muhammadiyah 4 Jakarta Terhadap Permendikbud Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan," *Humaniorum* 3, no. 1 (2025): 32–37, <https://doi.org/10.37010/hmr.v3i1.58>.

²⁴ Muslim Lobubun, Yohanis Anthon Raharusun, and Iryana Anwar, "Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 294–322, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.294-322>.

²⁵ Sucika, P., & Suprpta, I. N. (2018). Implementasi Program BOS di SD Negeri 1 Penarukan. *Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia*, 3(1), 25–35.

²⁶ Atik Rochaeni, "Interpretasi Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bandung," *Jurnal Ilmu Sosial* 21, no. 2 (2023): 8–17.

nasional.²⁷ Namun, sifatnya yang umum seringkali tidak relevan dengan kondisi daerah terpencil. Meski Dinas Pendidikan telah mengadakan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman kepala sekolah, sebagian sekolah masih salah menafsirkan aturan sehingga dana tidak menyentuh kebutuhan riil. Contohnya, pembelian perangkat teknologi di sekolah yang belum memiliki listrik stabil, sementara pemeliharaan ruang kelas justru terabaikan.

Faktor sosial ekonomi juga memengaruhi interpretasi. Mayoritas masyarakat Padang Lawas bekerja di sektor informal dengan pendapatan rendah, sehingga pendidikan lanjutan kurang diprioritaskan. Banyak orang tua menganggap cukup bila anak sekadar bisa membaca dan menulis. Hal ini memperlihatkan bahwa BOS tidak hanya harus diinterpretasikan untuk kebutuhan internal sekolah, tetapi juga sebagai sarana advokasi bagi masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Selain itu, keterbatasan SDM di sekolah pelosok memperburuk interpretasi kebijakan. Sekolah di perkotaan lebih mampu menyusun laporan dan memanfaatkan BOS secara optimal, sementara sekolah terpencil terkendala teknis dan minim tenaga administrasi. Akibatnya, terjadi ketimpangan fasilitas antara sekolah kota dan desa. Tanpa regulasi lokal seperti Peraturan Bupati (Perbup), setiap sekolah menafsirkan aturan pusat dengan caranya sendiri, menimbulkan perbedaan implementasi dan potensi penyimpangan.

Kondisi ini menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menghadirkan regulasi teknis yang kontekstual, pendampingan intensif, dan pengawasan yang lebih substantif.²⁸ BOS seharusnya tidak hanya diartikan sebagai subsidi biaya sekolah, tetapi sebagai instrumen pemerataan mutu pendidikan yang menyesuaikan realitas sosial dan geografis.²⁹ Sebagaimana pandangan Paulo Freire, pendidikan harus membebaskan dari kebodohan dan ketimpangan struktural. Interpretasi BOS di Padang Lawas perlu diarahkan pada pemenuhan kebutuhan mendasar, peningkatan kesadaran masyarakat, serta pengurangan kesenjangan antarwilayah. Dengan interpretasi yang tepat, BOS dapat benar-benar menjadi jembatan antara kebijakan pusat dan kebutuhan nyata masyarakat.

C. Penerapan/Aplikasi (Implementation/Application)

Implementasi Dana BOS di Kabupaten Padang Lawas menunjukkan dinamika kompleks antara kebijakan pusat, kondisi lokal, dan realitas lapangan.³⁰ Program ini bertujuan mendukung operasional pendidikan dan peningkatan mutu, namun pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan anggaran, minimnya pemahaman regulasi, hingga ketidaksesuaian pemanfaatan dana dengan kebutuhan sekolah. APBD Kabupaten Padang Lawas tahun 2021–2023 menunjukkan alokasi anggaran pendidikan berkisar 22–25%, namun nilainya tidak stabil tiap tahun. Dari pos ini diambil dana BOS dengan persentase 5–9%. Tahun 2025 jumlahnya meningkat hampir dua kali lipat menjadi Rp48,4 miliar, mencerminkan komitmen pemerintah. Namun efektivitas pemanfaatannya masih terbatas karena karakteristik wilayah pedesaan, keterbatasan SDM, dan sistem alokasi yang bergantung pada jumlah siswa.

²⁷ Lia Ameliawati, Tasya Kurnia, and Naila Salsabilla, "Perbandingan Akuntabilitas Transparansi Pengelolaan Dana Bos Pada SD Negeri Dan Swasta," *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsur* 10, no. 1 (2025): 78–92, <https://doi.org/10.35968/jbau>.

²⁸ Srisaparmi Srisaparmi et al., "Problematisasi Dan Tantangan Desentralisasi Di Indonesia: Kajian Literatur Review Pasca Reformasi," *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* 7, no. 2 (2025): 213–20, <https://doi.org/10.24036/jmiap.v7i2.1223>.

²⁹ AHMAD ARDI Yahya, "Operasional Sekolah (Bos) Dan Sekolah Gratis (Kasus Di Wilayah Kecamatan Blimbing Kota Malang)," *Unbran*, 2013.

³⁰ Yahya.

Sekolah terpencil dengan murid sedikit justru menerima dana lebih kecil meski kebutuhan fasilitas lebih besar. Wawancara dengan pejabat Dinas Pendidikan menegaskan bahwa dana BOS tidak dapat digunakan untuk memperbaiki kerusakan berat bangunan, hanya pemeliharaan ringan. Sementara itu, 77% APBD sektor pendidikan terserap untuk gaji guru, membuat kebutuhan lain seperti pelatihan, digitalisasi, dan perbaikan gedung bergantung pada BOS. Data 2022 menunjukkan anggaran untuk SMP hanya Rp9,5 miliar dibanding Rp174 miliar untuk gaji guru. Kondisi ini menyebabkan banyak sekolah terbengkalai, sebagaimana terlihat di SMPN 1 Aek Nabara Barumon. Permasalahan semakin berat dengan adanya kasus penyalahgunaan dana BOS di SMPN 1 Sosa Julu. Namun, tidak semua sekolah mengelola dana secara keliru. MTsN 1 Padang Lawas menjadi contoh pengelolaan transparan dengan melibatkan orang tua sehingga mampu memperbaiki fasilitas dan membayar guru honorer.

Hal ini sejalan dengan Permendikbudristek No. 63 Tahun 2023 tentang pemanfaatan BOS. Di sisi lain, pemerintah telah menunjukkan upaya positif, seperti pemerataan guru, pembangunan unit sekolah baru, serta penyediaan sarana prasarana dasar. Meski demikian, tantangan baru muncul terkait penggunaan teknologi. Di Desa Sipagabu, anak-anak lebih memilih bermain game online daripada sekolah, menunjukkan lemahnya peran keluarga dalam menanamkan kesadaran pendidikan. Secara keseluruhan, implementasi Dana BOS di Padang Lawas belum sepenuhnya efektif. Besarnya anggaran tidak otomatis meningkatkan kualitas jika pengelolaan tidak sesuai kebutuhan nyata sekolah. Ke depan, dibutuhkan pengawasan ketat, pemberdayaan masyarakat, dan sinergi berbagai pihak agar dana BOS menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan, bukan sekadar dana rutin operasional.

D. Implementasi Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Padang Lawas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Dana BOS di Kabupaten Padang Lawas belum sepenuhnya efektif dalam mendukung pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan. Berdasarkan teori implementasi kebijakan Charles O. Jones (1996), terdapat tiga aspek utama yang menjadi sorotan, yakni pengorganisasian, interpretasi, dan penerapan/aplikasi. Pengorganisasian Dana BOS di Kabupaten Padang Lawas masih terbatas karena seluruh mekanisme pengelolaan hanya mengacu pada regulasi pusat, yaitu Permendikbudristek No. 63 Tahun 2023.³¹ Ketiadaan regulasi lokal berupa Peraturan Bupati (Perbup) menjadikan kebijakan kurang adaptif terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan geografis masyarakat. Hal ini menyebabkan perbedaan implementasi antar sekolah, terutama antara sekolah di perkotaan dan daerah terpencil. Monitoring yang dilakukan oleh dinas pendidikan juga masih bersifat administratif, belum menyentuh substansi kebutuhan sekolah.

Akibatnya, Dana BOS belum mampu menjawab persoalan riil seperti tingginya angka putus sekolah, keterbatasan sarana, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Interpretasi kebijakan BOS di tingkat sekolah masih lemah. Beberapa sekolah salah menafsirkan juknis sehingga dana tidak menyentuh kebutuhan mendasar, misalnya pembelian teknologi di daerah dengan listrik tidak stabil. Faktor sosial-ekonomi masyarakat yang sebagian besar bekerja di sektor informal juga memengaruhi persepsi terhadap pendidikan; banyak orang tua yang tidak memprioritaskan sekolah lanjutan bagi anaknya. Tanpa pendampingan dan regulasi daerah, interpretasi BOS menjadi tidak seragam, bahkan berpotensi menimbulkan penyimpangan. Dengan demikian, BOS

³¹ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Statistik Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Padang Lawas*. Diakses dari <https://kemendikbud.go>

seharusnya tidak hanya diartikan sebagai subsidi biaya sekolah, tetapi juga instrumen pemerataan mutu pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat. Dalam aspek penerapan, alokasi dana BOS mengalami peningkatan signifikan hingga Rp48,4 miliar pada tahun 2025.

Namun, sistem distribusi berbasis jumlah siswa justru merugikan sekolah kecil di wilayah terpencil, yang meski memiliki kebutuhan besar, memperoleh dana lebih sedikit. Kasus penyalahgunaan dana BOS di salah satu SMP memperlihatkan lemahnya pengawasan, meskipun terdapat contoh baik seperti MTsN 1 Padang Lawas yang mampu mengelola dana secara transparan dan melibatkan masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan praktik di lapangan, dipengaruhi kapasitas manajemen sekolah dan dukungan lingkungan³².

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun anggaran pendidikan meningkat, Dana BOS di Kabupaten Padang Lawas belum optimal sebagai instrumen peningkatan mutu. Kelemahan pengorganisasian, interpretasi, dan penerapan memperlihatkan perlunya:

1. Regulasi daerah (Perbup) untuk menyesuaikan kebijakan pusat dengan konteks lokal.
2. Pendampingan intensif bagi sekolah, khususnya di daerah terpencil, agar interpretasi BOS sesuai kebutuhan nyata.
3. Pengawasan substantif, transparansi, dan pelibatan masyarakat agar penggunaan dana lebih akuntabel.

Dengan perbaikan tersebut, implementasi BOS diharapkan tidak sekadar menjadi dana rutin operasional, melainkan benar-benar berkontribusi terhadap pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Padang Lawas.

Implementasi Program Dana BOS untuk jenjang SMP di Kabupaten Padang Lawas bertujuan meningkatkan mutu pendidikan dan mengurangi beban biaya masyarakat. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif. Jumlah siswa yang melanjutkan ke SMP masih rendah, dipengaruhi faktor ekonomi, lingkungan, keterbatasan sarana prasarana, serta akses teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dana BOS sudah disalurkan, program ini belum sepenuhnya mendukung peningkatan mutu pendidikan. Berdasarkan tiga pilar implementasi menurut Charles O. Jones (1996), hasil penelitian menunjukkan: (1) Pengorganisasian masih lemah karena belum ada regulasi daerah yang menyesuaikan kebijakan pusat dengan kondisi lokal; (2) Interpretasi kebijakan kurang tepat, terlihat dari penggunaan dana yang tidak sesuai kebutuhan, misalnya pembelian teknologi di daerah dengan listrik tidak stabil; (3) Penerapan belum optimal karena meskipun anggaran meningkat, alokasi berbasis jumlah siswa justru merugikan sekolah kecil di daerah terpencil.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Padang Lawas memang menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan melalui bertambahnya alokasi anggaran, pembangunan unit sekolah baru, serta distribusi guru yang lebih merata. Namun, temuan terpenting penelitian ini adalah bahwa meskipun anggaran BOS meningkat, dampaknya terhadap mutu pendidikan justru belum signifikan. Hal yang mengejutkan adalah ketimpangan alokasi dana berdasarkan jumlah siswa, sehingga sekolah kecil di daerah terpencil justru menerima dana yang sangat minim padahal memiliki kebutuhan lebih besar. Selain itu, ketiadaan regulasi daerah seperti Peraturan Bupati juga menjadikan pengelolaan BOS

³²Makkawaru, M. (2019). Pentingnya pendidikan bagi kehidupan dan pendidikan karakter dalam dunia pendidikan. *Jurnal Konsepsi*, 8 (3), 116-119

kurang terorganisir, tidak seragam, dan rawan penyelewengan. Dari sisi kontribusi keilmuan, penelitian ini menyumbangkan perspektif baru bahwa implementasi BOS tidak hanya dapat dilihat dari aspek teknis administrasi dan pencairan dana semata, melainkan juga harus mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan geografis lokal. Hasil ini memperkuat sebagian penelitian sebelumnya yang menyoroti masalah akuntabilitas penggunaan BOS, namun sekaligus menggugat klaim bahwa peningkatan alokasi anggaran otomatis berdampak pada peningkatan mutu pendidikan. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada lingkungannya yang hanya berfokus pada SMP di satu kabupaten, dengan jumlah informan yang terbatas serta belum membandingkan implementasi BOS pada jenjang pendidikan lain atau di wilayah berbeda. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dengan cakupan lokasi yang lebih luas, variasi jenjang pendidikan, serta jumlah sampel yang lebih besar sangat diperlukan agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Daftar Pustaka

- Ameliawati, Lia, Tasya Kurnia, and Naila Salsabilla. "Perbandingan Akuntabilitas Transparansi Pengelolaan Dana Bos Pada SD Negeri Dan Swasta." *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsurya* 10, no. 1 (2025): 78–92. <https://doi.org/10.35968/jbau>.
- Amiruddin, M Syukron Ali, Moh Ansori Ft, Mahrus Ali, and Anim Jauhariyah. "Policy Innovations in Reducing Education Costs : Evidence-Based Strategies to Improve Accessibility and Quality Inovasi Kebijakan Dalam Mengurangi Biaya Pendidikan : Strategi Berbasis Bukti Untuk Meningkatkan Aksesibilitas Dan Kualitas." *Ico Edusha*, 2024, 557–69.
- Darim, Abdu. "Manajemen Perilaku Organisasi Dalam Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Kompeten." *Munaddhomah* 1, no. 1 (2020): 22–40. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v1i1.29>.
- Harahap, Wildan Fauzi, Imsar Imsar, and Nur Ahmadi Bi Rahmani. "Analisis Efektivitas Pemekaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Dalam Perspektif Maqasyid Syariah." *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 11, no. 2 (2023): 1869–84. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i2.4966>.
- Karimulah, Achmad, and Nur Ittihadatul Ummah. "Pelaksanaan Supervisi Akademik Kepala Madrasah Sebagai Upaya Meningkatkan Profesionalisme Guru Untuk Memotivasi Belajar Siswa MTs Muqoddimatul Akhlak Curah Wungkal Silo Jember." *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management* 3, no. 1 (2021): 13–34. <https://doi.org/10.21154/sajiem.v3i1.74>.
- Lobubun, Muslim, Yohanis Anthon Raharusun, and Iryana Anwar. "Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 294–322. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.294-322>.
- Nursiniah, Shofwa, and Rusmiati Aliyyah. "Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar." *Karimah Tauhid* 3 (2024): 2832–55.
- Rochaeni, Atik. "Interpretasi Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bandung." *Jurnal Ilmu Sosial* 21, no. 2 (2023): 8–17.
- Sari, Dwi Wulan, and Qolbi Khoiri. "Pendidikan Untuk Semua: Studi Pada Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun." *Journal on Education* 5, no. 3 (2023): 9441–50. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i3.1757>.
- Setiawan, Heri, and Marjan Miharja. "Analisis Penggunaan Dana BOS Di SMA Muhammadiyah 4 Jakarta Terhadap Permendikbud Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan." *Humaniorum* 3, no. 1 (2025): 32–37. <https://doi.org/10.37010/hmr.v3i1.58>.
- Shaleheh, Sufia, Viony Dwi Arfa, Ermita, and Fifin Wildanah. "Strategi Pengelolaan Dana BOS Untuk Mewujudkan Efisiensi Dan Efektivitas Keuangan Sekolah." *Jurnal Ilmu Manajemen*

Implementasi Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Padang Lawas

- Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2025): 400–408.
- Sisilia Windy, Pri. “Tantangan Dan Solusi Dalam Menegelola Keuangan Sekolah Secara Efektif.” *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan* 02, no. 01 (2025): 350–55.
- Sitorus, Ellen Rotua Basaria, Widiayati, Nurdiansari, Nurlelawati, and Uspandi Haryaka. “Analisis Kebijakan Pembiayaan Pendidikan Tingkat SMP Di Indonesia Tantangan Dan Strategi Penanganan.” *Jurnal Pendas Mahakam* 9, no. February (2024): 4–6.
- Srisaparmi, Srisaparmi, Aldri Frinaldi, Lince Magriasti, and Hendra Naldi. “Problematika Dan Tantangan Desentralisasi Di Indonesia: Kajian Literatur Review Pasca Reformasi.” *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* 7, no. 2 (2025): 213–20.
<https://doi.org/10.24036/jmiap.v7i2.1223>.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- . *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan RD*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- . *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Yahya, AHMAD ARDI. “Operasional Sekolah (Bos) Dan Sekolah Gratis (Kasus Di Wilayah Kecamatan Blimbing Kota Malang).” *Unbran*, 2013.